

# KOMUNITAS EKONOMI ASEAN DAN MENINGKATNYA ARTI PENTING ADMM: SEBUAH ANALISIS EKONOMI POLITIK KEAMANAN

## ASEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE EMERGING IMPORTANCE OF ADMM: A POLITICAL ECONOMY OF SECURITY ANALYSIS

Semmy Tyar Armandha<sup>1</sup>

Universitas Pertahanan Indonesia  
(semmytyar@gmail.com)

**Abstrak** -- Pembentukan ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dapat dikatakan merupakan sinergi antara penciptaan mekanisme pasar bebas ASEAN Economic Community di kawasan Asia Tenggara, dengan adanya komunitas keamanan guna mewujudkan visi ASEAN 2020. Sinergi antara pasar bebas dan komunitas keamanan menjadi prakondisi bagi visi ASEAN 2020 semenjak Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat strategis baik secara ekonomi maupun politik global negara-negara hegemoni. Dengan menggunakan kerangka teori *security community*, yang digunakan Amitav Acharya via Karl Deutsch –yang menjelaskan kecenderungan negara-negara berkembang untuk mengelola anarki internasional sebagai alternatif dilema keamanan dan interdependensi (neorealisme dan neoliberal-institusional) yang dinilai terlalu linier dalam memandang interaksi antar negara– penulis menekankan aspek keterhubungan antara ekonomi dan pertahanan dengan menggunakan teori *governmentality Foucauldian* yang dioperasionalkan dalam *state of exceptional* Michael Hardt-Antonio Negri dan aparatus oikonomia Giorgio Agamben, sebagai bentuk prakondisi yang memungkinkan *security community* terjadi. Sederhananya, ADMM merupakan perangkat yang tak terelakkan jika ASEAN ingin serius menciptakan ekonomi pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ADMM dengan demikian adalah realita yang niscaya di saat suatu kawasan ingin membentuk perjanjian pasar bebas.

**Kata kunci:** ASEAN Defense Ministers' Meeting, ASEAN Economic Community 2015, komunitas keamanan, *state of exception*, aparatus oikonomia

**Abstract** -- Establishment of the ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) can be said to be a synergy between the creation of a free market of ASEAN Economic Community in Southeast Asia, with the security community in order to realize the ASEAN Vision 2020. The synergy between the free market and the security community shall be a precondition for the ASEAN Vision 2020 since Southeast Asia is an area of great strategic, economic and political hegemony of global states. By using the security community theoretical framework used by Amitav Acharya via Karl Deutsch – which describes the tendency of developing countries to manage international anarchy as an alternative to the security dilemma and interdependence (neorealism and neoliberal-institutional) are considered to be too linear in view of the interaction among nations—the author emphasize the interrelation between economic aspect the defense aspect using the Foucauldian governmentality theory utilizing the operationalization within the state of exceptional theory by Antonio Negri and

---

<sup>1</sup> Penulis adalah kandidat Magister Sains Pertahanan di Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia, dan peneliti di Yayasan PURUSHA Research Cooperative Jakarta.

*Giorgio Agamben' oikonomia apparatus, as a form of preconditions that enable the security community to happen. Simply put, the ADMM is a device that is inevitable if ASEAN wants to seriously create a free market economy in Southeast Asia. The establishment of ADMM is thus inevitable in the current reality of a region in order to form a free trade agreement.*

**Keywords:** ASEAN Defense Ministers' Meeting, ASEAN Economic Community 2015, governmentality, security community, state of exception, oikonomia apparatus

## **Pendahuluan**

Makalah ini setidaknya ingin menunjukkan tiga hal: *pertama*, bahwa untuk membangun suatu mekanisme pasar dalam teritorialisasi yang baru, adalah penting untuk membentuk mekanisme pertahanan pada teritorialisasi tersebut guna membangun citra maupun batas-batas yang jelas sehingga kegiatan ekonomi pada kawasan tersebut dapat terjamin keberlangsungannya. *Kedua*, perilaku negara yang dapat dilihat dari kondisi tersebut oleh karenanya, adalah tidak terbatas pada perilaku yang *self-help* (egois), mengutamakan perang, dan menjaga *status quo* dilema keamanan yang merupakan sederet asumsi-asumsi realisme dan neorealisme dalam memandang hubungan internasional.<sup>2</sup>

Di sisi lain, negara juga tidak selalu berada dalam kondisi ketergantungan terhadap pola interaksi kerja sama; dimana ekonomi memainkan peranan yang lebih besar dari *security* karena demokrasi dan kapitalisme neoliberal memungkinkan negara hanya berinteraksi secara rasional-ekonomis. Negara-negara berkembang yang notabene masih membutuhkan bantuan asing dalam menopang perekonomiannya, membutuhkan kerjasama dan pembangunan serta transfer teknologi, namun juga membutuhkan penguatan komunitas keamanan guna menjamin persaingan di bidang ekonomi berlangsung secara aman. *Ketiga*, bahwa dua kondisi tersebut memberikan pemahaman bahwa pertahanan (*defense*) adalah bidang yang sama sekali tak terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, bahkan di era dominasi tatanan neo-liberalisme sekalipun yang mana andil negara lebih kecil ketimbang aktor ekonomi lain.

ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) dapat dikatakan sebagai upaya untuk membangun komunitas, mengembangkan dan mematerialisasikan institusionalisasi kerja sama praktis di bidang pertahanan oleh negara-negara anggota *Association of South East*

---

<sup>2</sup> Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, (New York: Routledge, 2001), hlm. 1-2.

*Asia Nations* (ASEAN) yang bertujuan untuk meregulasi pertemuan tahunan yang membahas isu keamanan nontradisional berdasarkan sistem *rotasional Expert Working Groups* (EWGs).<sup>3</sup> ADMM adalah pembedaan dari kerangka *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang lebih berurusan dalam menangani ancaman tradisional. ADMM dibentuk pada 2006 dan melakukan pertemuan pertamanya pada 9 Mei 2006.

Tujuan didirikannya ADMM antara lain mempromosikan perdamaian regional dan kestabilan melalui dialog dan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, mempromosikan kepercayaan bersama dan kepercayaan diri melalui pemahaman yang lanjut mengenai tantangan pertahanan dan keamanan sebagai salah satu bagian dari transparansi dan keterbukaan, dan yang paling penting adalah untuk mendukung realisasi *ASEAN security community* yang diputuskan dalam Bali Concord II, yang bertujuan untuk membangun aspirasi ASEAN untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, demokrasi, dan kesejahteraan di kawasan dimana anggot ASEAN berada.<sup>4</sup>

Pada 2015, akan dicanangkan *ASEAN Economic Community* yang awalnya merupakan kesepakatan Visi ASEAN 2020 yang dicanangkan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur. Deklarasi tersebut mencita-citakan transformasi kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif yang didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang. Hal ini semakin dikukuhkan dalam Bali Concord II pada Oktober 2003 yang berisi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai cara untuk mencapai visi 2020 tersebut.

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (*ASEAN Economic Ministers Meeting*) mencanangkan pada Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan dan sebuah cetak biru yang mulai diaplikasikan oleh negara anggota ASEAN mulai November 2007. Pertemuan puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, semakin mengkonkritkan komitmen tersebut dengan dicanangkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015. Terdapat lima elemen inti yang mendasari operasional Masyarakat Ekonomi ASEAN: (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal;

---

<sup>3</sup> Lihat, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/category/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diunduh pada 6 November 2014.

<sup>4</sup> *Ibid.*

dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Hal ini berkonsekuensi pada harus siapnya Indonesia untuk menyambut persaingan yang begitu terbuka dengan negara-negara ASEAN baik dari segi perdagangan maupun persaingan lapangan pekerjaan dan bisnis.<sup>5</sup>

Dicanangkannya pasar bebas di Asia Tenggara, selain memiliki konsekuensi bagi keharusan setiap negara mempersiapkan diri menyambut tingkat persaingan yang semakin tinggi, juga membuat kawasan Asia Tenggara semakin tinggi tatanan interdependensinya yang oleh karenanya semakin tinggi pula negara-negara besar yang akan tertarik untuk melakukan kerja sama. ASEAN *plus three*, ADMM plus, dan *East Asia Community* adalah beberapa contoh forum kerja sama yang memfasilitasi kerja sama ASEAN dengan negara di luar Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan betapa ASEAN menjadi kawasan yang menarik, selain karena faktor-faktor ekonomis dan produktif, juga karena negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia berhasil lolos dari keterpurukan krisis ekonomi 2008.

Oleh karenanya, ADMM dan ASEAN *Economic Community 2015* (Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015) dapat dikatakan dua hal yang saling terkait. Di satu sisi berupaya untuk membangun kesejahteraan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas dan persaingan, dan di sisi lain merupakan upaya membangun stabilitas dan keamanan di kawasan. Membangun suatu kawasan perdagangan bebas tentu memiliki konsekuensi adanya perhatian khusus pula pada pembentukan komunitas keamanan. Menurut Amitav Acharya, pembentukan ASEAN *Political-Security Community* merupakan bentuk dari upaya negara-negara berkembang yang ada di Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas: pertama, *security community* meningkatkan kemungkinan bahwa melalui interaksi dan sosialisasi, negara-negara dapat mengelola anarki.<sup>6</sup> Kedua, teori ini mempelajari dan menawarkan kerangka teoritis dan analitis dalam melihat dampak dari institusi internasional guna mempromosikan perubahan damai dalam hubungan internasional.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Dodi Mantra, *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015* (Jakarta: Mantrapress, 2011), hlm. 3-8.

<sup>6</sup> Amitav Acharya, *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*, (New York: Routledge, 2001), hlm. 1-2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Lalu bagaimanakah ADMM dapat mendukung berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015? Pemikiran Amitav Acharya mengenai *security community* dapat dikatakan juga berupaya menjawab pertanyaan ini. Acharya membangun proposisi yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang tidak sama dengan negara-negara maju yang dapat memilih apakah mereka ingin bersitegang dengan melakukan perlombaan senjata atau justru memainkan kerja sama yang intens.

Teori *security community* dapat dikatakan mencoba memberikan alternatif dari linearitas cara berpikir paradigma neorealisme (yang melihat interaksi antarbangsa selalu konfliktual) dan cara berpikir neoliberalisme (yang melihat interaksi antarbangsa sarat akan kerja sama jika sistem demokratis. ASEAN dalam hal ini bergantung pada kedua paradigma tersebut dalam waktu yang bersamaan dimana membangun komunitas keamanan dan kerja sama ekonomi adalah kebutuhan mendesak yang jika tidak dilakukan, maka akan berakibat pada ketergantungan yang dalam dengan negara-negara maju di luar ASEAN yang ingin memiliki pengaruh dan meraup keuntungan dari pengaruh tersebut.

Namun jika dikaji lebih jauh, teori *security community* yang di satu sisi merupakan teori yang mampu secara presisi mendeskripsikan pola interaksi di ASEAN, namun di sisi lain tidak menjelaskan bagaimana dan dalam kondisi apa interaksi *security community* tersebut dimungkinkan ada dan menjadi klaim teoritik terhadap semua negara berkembang yang akan mencoba membangun sebuah komunitas (baik ekonomi maupun keamanan). Dengan kata lain, Acharya tidak melihat adanya dimensi keterhubungan antara prakondisi ekonomi dan adanya komunitas ekonomi dalam suatu kawasan (dan batas-batas yang melingkupinya) sebagai prakondisi pula pada justifikasi dibangunnya suatu komunitas keamanan.

### **Tinjauan Literatur**

Teori *security community* pertama kali dikembangkan Karl Deutch. Pertama, *security community* meningkatkan kemungkinan bahwa melalui interaksi dan sosialisasi, negara-negara dapat mengelola anarki, dan meski dapat lolos dari *security dilemma*, kondisi realis, neorealis, dan neoliberal adalah fitur permanen yang akan terus terjadi dalam

hubungan internasional.<sup>8</sup> Kedua, teori ini mempelajari dan menawarkan kerangka teoritis dan analitis dalam melihat dampak dari institusi internasional dalam mempromosikan perubahan damai dalam hubungan internasional. Kerangka ini menantang pendekatan dominan realisme, neorealisme dan juga neoliberalisme yang telah menjadi debat antara 1980an hingga 1990an.

*Security community*, melihat hubungan internasional sebagai proses pembelajaran sosial, formasi identitas, yang dikendalikan dari transaksi, interaksi, dan sosialisasi. Bahwa perubahan dapat terjadi secara damai dengan adanya persepsi dan identifikasi antar aktor. Hal ini menjelaskan mengapa negara dapat memilih interdependensi dan *responsiveness*, sehingga mengabaikan penggunaan kekuatan (*use of force*) guna menyelesaikan permasalahan antara mereka. Hubungan internasional dapat direkonseptualisasi sebagai “*world society of political communities, consisting of social groups, a process of political communication, machinery for enforcement, and popular habits of compliance.*” Ketiga, teori ini menjelaskan dinamika regionalisme di negara-negara berkembang. Bersama dengan Ernst Haas, Deutsch mengembangkan pendekatan neo-fungsional dan transaksionalisme.<sup>9</sup>

### **Kerangka Pemikiran**

Thomas Hobbes dalam *Leviathan* mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan jahat sehingga akan selalu mengejar kepentingannya masing-masing sebagai upaya bertahan hidup (*survival of the fittest*) dan akan selalu berupaya menyingkirkan manusia lain.<sup>10</sup> Thomas Hobbes tidak salah dalam mengargumentasikan hal ini, namun Hobbes tidak menjelaskan apa yang memungkinkan praktik *homo homini lupus* ini terus berlangsung dan menjadi fenomena yang universal sehingga tidak dipertanyakan kembali struktur yang memungkinkannya. Dengan kata lain, analisis Hobbes tidak sampai pada struktur apa yang melandasi manusia dapat saling brutal menyingkirkan yang lain demi mengejar upaya bertahan hidup. Demikian pula analisis-

---

<sup>8</sup> Amitav Acharya, *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan: The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall*, (London: St. Paulus Church-yard, 1651), hlm. 128.

analisis realisme politik hingga realisme struktural dalam keilmuan Hubungan Internasional pada umumnya yang lahir dan terinspirasi dari pemikiran Hobbes tersebut.<sup>11</sup> Pada satu sisi, individu menentukan interaksi, di sisi lain interaksi menjadi terstruktur dan menentukan pilihan-pilihan individu dalam bertindak.

Demikian pula pendekatan-pendekatan idealisme (liberalisme hingga neoliberalisme) juga menawarkan baik pendekatan dari sisi individu (agensi) maupun interaksi (struktural), dimana faktor ekonomi selalu dikedepankan dalam unit-unit analisisnya.<sup>12</sup> Pendekatan idealisme memandang bahwa kerja sama adalah natur dari setiap interaksi manusia dan hanya melalui kerja sama, manusia dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang cenderung berbenturan.<sup>13</sup> Hal ini tentu lebih absurd dari pendekatan realisme karena mengasumsikan manusia akan dengan mudah tunduk oleh akomodasi-akomodasi ala kerja sama dan menyingkirkan potensi-potensi adanya perilaku curang (*cheating*) yang selalu mungkin terjadi dalam interaksi antar manusia.

Kedua pendekatan di atas mempunyai kesamaan pula pada pandangannya terhadap perang dan ekonomi. Negara selalu dikaitkan dalam setiap interaksi perang dan ekonomi dan oleh karenanya selalu menjadi bagian konstitutif yang prerogatif hanya dimiliki oleh negara. Argumentasi ini selain menjadikan pengetahuan tentang perang menjadi bias oleh entitas bernama negara, juga menjadikan masing-masing terminologi menjadi terpisah atau terpaksa terpisah. Hal ini karena perang dan ekonomi menjadi diklasifikasikan kepada bagian-bagian atau biro-biro khusus yang menangani keduanya. Perang misalnya, memiliki kementerian sendiri yakni Kementerian Pertahanan, sementara ekonomi ditangani oleh Kementerian Perekonomian. Tentu saja praktik pemisahan kepengurusan ini tidak boleh menjadikan penelusuran ilmiah terhadap perang dan ekonomi menjadi bias oleh kepentingan-kepentingan politik yang didasari oleh entitas bernama negara.

Pembentukan *security community* tersebut dapat dikatakan merupakan elaborasi bahwa perilaku negara-negara di satu sisi mengutamakan negara-sentrisme dimana rasa

---

<sup>11</sup> Kenneth Waltz, *Man, The State and War*, (New York: Columbia University Press, 1997), hlm. 1-2.

<sup>12</sup> Nikolas Rose & Peter Miller, "Political power beyond the State: Problematics of Government", *The British Journal of Sociology, London School of Economics and Political Science*, 2010, hlm. 272-303.

<sup>13</sup> Joseph Nye, "Soft Power", *Foreign Policy Journal*, No. 80, *Twentieth Anniversary*, 1990, hlm. 153.

curiga dominan dalam interaksinya sehingga memungkinkan *security dilemma*, namun di sisi lain negara juga membutuhkan kerjasama dalam membentuk pertahanan di suatu teritori selain kerjasama dalam bidang ekonomi. Nampaknya teori ekonomi mengenai *invisible hand* juga berlaku bagi pembentukan komunitas keamanan; yakni tanpa diaturpun komunitas keamanan niscaya menjadi perlengkapan tak terelakan dari suatu teritori agar keamanan dan kestabilan terjaga.

Oleh karenanya, mengatakan bahwa ekonomi dan keamanan (pertahanan) adalah dua hal yang terpisah, adalah sebuah pemikiran yang *simplicissimus*. *Simplicissimus* adalah istilah yang digunakan Michael Hardt dan Antonio Negri dalam menganalogikan pandangan-pandangan tentang perang yang simplisistis (terlalu sederhana). *Simplicissimus* adalah tokoh dalam novel abad ke delapan belas karya Johan Grimmelshausen, yang memandang segala sesuatu secara sangat sederhana dan hanya melihat secara parsial.<sup>14</sup> Dalam novel tersebut, *simplicissimus* memandang perang di Jerman yang melibatkan Swedia, Spanyol, dan Denmark adalah perang yang sama saja sebab-akibatnya, padahal memiliki corak dan ciri khas masing-masing yang tidak dapat disamakan baik kedudukannya maupun spesifikasinya. Keseluruhan argumentasi dalam makalah ini akan mengacu pada kritik terhadap cara pandang ala *simplicissimus* ini, yang ditunjukkan oleh pemahaman-pemahaman yang memisahkan antar perang dan politik (menurut Hardt, Negri, dan Foucault), dan khususnya diterjemahkan oleh penulis sebagai pemisahan otoritatif terhadap studi ekonomi dan pertahanan.

Hardt dan Negri dalam *Multitude* menjelaskan bahwa perang tidak lagi melulu dalam interaksi negara karena adanya interaksi yang berpola dari perang itu sendiri yakni pola *state of exception* atau pengecualian terhadap agensi perang.<sup>15</sup> Hardt dan Negri mengemukakan, “*war was a limited state of exception*”, yakni di mana perang dikecualikan dalam agensi-agensi tertentu saja seperti negara dan hanya negara tertentu saja. Hal ini justru memungkinkan perang menjadi semakin melebur dalam interaksi sosial secara general, mengapa? Karena dalam perang terdapat unsur politik yang turut bermain. Interaksi politik dalam era kontemporer sendiri juga semakin melebur dalam

---

<sup>14</sup> Michael Hardt & Antonio Negri, *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, (New York: The Penguin Press, 2004), hlm. 5-6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12-13.



interaksi sosial masyarakat dan bahkan kegiatan ekonomi. Foucault dalam teorisasinya mengenai praktik *governmentality*, mengajukan tesis bahwa politik sudah “mendarah daging” dalam kehidupan terkecil manusia, dari presiden hingga kepala keluarga, adalah agensi-agensi politik.<sup>16</sup>

Konsep *biopower* sebagai alat mempraktikkan mikropolitik merupakan ciri khas pemerintahan neoliberalisme yang sejatinya menurut Foucault sudah dimulai sejak awal abad ke-delapan belas.<sup>17</sup> Dengan demikian, perang dan politik merupakan hal yang tidak terpisahkan sejak neoliberalisme muncul. Hal ini berimplikasi pada pemahaman yang ditawarkan ahli perang Carl Von Clausewitz yakni *war is the continuation of politics by other means*, dibalik oleh Foucault menjadi “*politics is the continuation of war by other means*.”<sup>18</sup> Hal ini tentu krusial mengingat pembalikan ini juga membalik pemahaman umum mengenai perang yang tadinya menjadi prerogatif negara menjadi lebur dalam interaksi sosial secara general, dan pada kelanjutannya membawa konsekuensi bahwa perang dan politik merupakan hal yang integral.

Pembalikkan konsepsi perang Clausewitz oleh Foucault ini, juga dilandasi oleh kerangka berpikir Foucault mengenai seni memerintah sebuah negara dalam sistem dan tatanan neo-liberal. Pemerintah dalam suatu negara tidak hanya menggunakan kekuasaannya secara langsung untuk mengendalikan rakyatnya (baik dengan militer ataupun rezim otokratik), melainkan juga melalui serangkaian pengaturan dari pengaturan (*conduct of conduct*) yang memungkinkan masyarakat teratur tanpa harus adanya campur tangan langsung dari pemerintah. Natur manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo oeconomicus*) dengan sendirinya memungkinkan pemerintahan melakukan seni mengaturnya. Pemerintah memiliki apa yang disebut Foucault sebagai (1) rasionalitas pemerintahan dan (2) teknologi pemerintahan. Rasionalitas pemerintahan adalah alasan atau justifikasi yang melandasai sebuah pemerintahan mengeluarkan kebijakan dan pengaturan administratif kepada rakyatnya, sehingga diciptakanlah teknologi untuk menanggulangi dan memungkinkan rasionalitas tersebut berjalan. Jadi, di satu sisi secara struktural pemerintah memiliki mekanismenya sendiri

---

<sup>16</sup> Nikolas Rose & Peter Miller, *op.cit.*, hlm. 273.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Michel Foucault, *Society Must be Defended: Lectures at the College De France*, (New York: Picador, 1997), hlm. xviii.

yang memungkinkan pengaturan berjalan tanpa adanya paksaan; di sisi lain secara agensi masyarakat memiliki natur *homo oeconomicus* yang memungkinkan mereka tunduk pada sistem pemerintahan tertentu.

Lalu bagaimana kaitannya dengan mekanisme ekonomi sebagai upaya manusia untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya? Giorgio Agamben menelusuri terminologi ekonomi yang ternyata berasal dari bahasa Yunani *oikonomia*, yakni gabungan dari istilah *oikos* dan *nomos*.<sup>19</sup> *Oikos* memiliki makna analogis berupa rumah yang isinya mencakup anggota-anggota (*members*), sedangkan *nomos* adalah tatanan atau cara-cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rumah beserta anggota-anggotanya tersebut.

*Oikos* memiliki dua unsur yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu sama lain, yakni adanya teritori (rumah) dengan manusia (anggota) yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, teritori dan kebutuhan manusia adalah dua variabel yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga jika yang satu hancur, maka yang lain akan hancur juga, atau jika yang satu diserang maka yang lain akan turut mengalami kerugian-kerugian. Konsep ini memperlihatkan secara jelas bahwa pemenuhan kebutuhan hidup tidak mungkin tidak, dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek pertahanan dan keamanan semenjak terdapat lebih dari satu *oikos* (bisa disebut keluarga lain, kelompok lain, suku bangsa lain, hingga negara lain) yang sewaktu-waktu dapat saja mengancam upaya mempertahankan hidup tadi.

*Nomos* merupakan upaya membentuk tatanan (sederhananya, mengorganisasi) yang memungkinkan *oikos* berjalan dan seminimal mungkin menghindari benturan-benturan dengan *oikos* lain. *Nomos* juga merupakan praktik suatu *oikos* agar tujuan-tujuan mempertahankan hidup dapat berjalan dengan baik, dengan tanpa penyesuaian dengan *oikos* lainnya. Dengan kata lain, *nomos* merupakan praktik pengorganisasian yang dijalankan untuk mencapai *oikos*, dengan atau tanpa memperhatikan *oikos* lain. Dari penjabaran ini semakin jelas bahwa praktik *nomos* tidak lain adalah praktik politik. Politik dan ekonomi, dengan demikian tidaklah merupakan dua hal yang berbeda, yang saling mengkonstitusi satu sama lain.

---

<sup>19</sup> Giorgio Agamben, *What is an Apparatus? And Other Essays*, (California: Stanford University, 2009), hlm.11.

Dengan mengacu pada penjabaran tersebut, dapat dikatakan bahwa perang merupakan interaksi yang mempengaruhi seluruh lini kehidupan manusia pada masa kini di bawah sistem kapitalisme dan negara-bangsa, yang oleh karenanya bukan lagi prerogatif sebagai konsep interaksi antar negara-bangsa. Proses dan upaya mencapai pertahanan hidup (dengan mengupayakan kebutuhan hidup) adalah pada dasarnya (*by default*) upaya untuk menciptakan pertahanan-pertahanan lain yang baik yang berbasis militer maupun gerakan sosial dan perlawanan. Hardt dan Negri menegaskan, “... today, however, war tends to extend even farther, becoming a permanent social relations..”,<sup>20</sup> untuk menutup argumentasi ini mereka melanjutkan, “...it may be that war is a continuation of politics by other means, but politics itself be that war conducted by other means...”.<sup>21</sup> Fenomena perang sebagai bagian dari seluruh kehidupan ini beserta mekanisme ekonomi yang menjadi “medan pertempuran”-nya, dengan demikian membuktikan bahwa ekonomi dan pertahanan pada awalnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Untuk menjawab permasalahan ini, terlebih dahulu akan diformulasikan pendekatan *security community* dalam pembentukan ADMM. Setelah itu baru akan dijabarkan bagaimana *security community* sejatinya resiprokal terhadap adanya *economic community*: yakni bahwa kedua jenis komunitas tersebut adalah keniscayaan agar suatu teritori mampu mengupayakan kesejahteraannya sendiri tanpa adanya intervensi berarti dari pihak di luarnya. Penulis menggunakan pendekatan *state of exceptional* yang dikembangkan Michael Hardt dan Antonio Negri untuk menjelaskan bahwa ekonomi sejatinya merupakan medan peperangan yang membutuhkan pertahanan di tapal-tapal batas wilayah tempat suatu komunitas ekonomi berada. Sedangkan untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya ekonomi adalah upaya yang tak lepas dari pertahanan dan keamanan, konsep apparatus oikonomia dari Giorgio Agamben dapat membantu untuk menjelaskan hal tersebut.

---

<sup>20</sup> Michael Hardt & Antonio Negri, *op.cit.*, hlm. 5-6.

<sup>21</sup> *Ibid.*

## Pembahasan

Rencana aksi ASEAN *Security Community* (ASC) yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-10 di Vientiane pada 29 November 2004, memutuskan bahwa ASEAN akan bekerja dengan tujuan untuk membentuk ADMM. ADMM adalah mekanisme konsultatif dan kooperatif tertinggi pertahanan di ASEAN. ADMM bertujuan mempromosikan kepercayaan bersama dan kepercayaan diri melalui pemahaman yang lanjut mengenai tantangan pertahanan dan keamanan sebagai salah satu bagian dari transparansi dan keterbukaan. Tujuan dari dibentuknya ADMM, seperti yang telah dirumuskan di Kuala Lumpur pada 9 Mei 2006, adalah sebagai berikut: 1) mempromosikan stabilitas dan perdamaian regional melalui dialog dan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan; 2) untuk memberikan panduan pada negara-negara ASEAN mengenai bagaimana ASEAN *security community* dibentuk dan bagaimana mencapainya; 3) mempromosikan kesalingpercayaan dan kepercayaan diri melalui pemahaman yang lebih luas dari tantangan keamanan dan pertahanan guna mencapai transparansi dan keterbukaan; 4) untuk mendukung jalannya ASEAN *Security Community* (ASC) yang diputuskan di Bali Concord II dan mempromosikan *Vientiane Action Programme* (VAP); 5) untuk memberikan manfaat kepada negara anggota ASEAN dalam membangun kapasitas untuk menghadapi tantangan keamanan.<sup>22</sup>

Kerangka teoritis *security community* melihat hubungan internasional sebagai proses pembelajaran sosial, formasi identitas, yang dikendalikan dari transaksi, interaksi, dan sosialisasi. Mempromosikan stabilitas dan perdamaian regional melalui dialog dan kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan dapat dikatakan sebagai pembelajaran sosial dan formasi identitas. Pembelajaran sosial di sini mengacu pada bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara dapat menyesuaikan diri dengan kerangka ADMM sehingga transfer informasi dapat mengoptimalkan perwujudan komunitas keamanan. Sedangkan bagi kepentingan formasi identitas, ADMM melalui budaya dialognya dapat menekankan identitas bersama yang meskipun beragam dan berprinsip *non-interference*.

---

<sup>22</sup> Lihat <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/category/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diunduh pada 6 November 2014.

Sementara untuk memberikan panduan pada negara-negara ASEAN mengenai bagaimana ASEAN *security community* dibentuk dan bagaimana mencapainya adalah juga salah satu proses pembelajaran sosial. Mempromosikan kesalingpercayaan dan kepercayaan diri melalui pemahaman yang lebih luas dari tantangan keamanan dan pertahanan, guna mencapai transparansi dan keterbukaan dan mendukung jalannya ASEAN *Security Community* (ASC) adalah bentuk dari sosialisasi guna memperkuat pertahanan di kawasan Asia Tenggara.

Kesepakatan ADIC (*ASEAN Defense Industry Collaboration*) yang disepakati pada Februari 2011, mempromosikan kolaborasi pertahanan di kawasan ASEAN yang menghasilkan lima area kesepakatan dari kerja sama keamanan: keamanan maritim (*maritime security*), pendampingan kemanusiaan dan bencana (*humanitarian assistance and disaster relief*), operasi perdamaian (*peacekeeping operations*), *counter-terrorism*, dan pengobatan militer (*military medicine*). Namun yang menjadi inti dari kerja sama ini adalah pembentukan kerja sama industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista dari negara-negara eksportir senjata seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Rusia. Dengan adanya ADIC, dimungkinkan pengurangan impor pertahanan (*defense import*) dari 25 miliar dollar per tahun hingga 12,5 dollar per tahun.<sup>23</sup> Dengan kata lain pengendalian dengan cara transaksi menjadi kondisi dasar kerja sama dalam ADIC untuk memberikan manfaat kepada negara anggota ASEAN dalam membangun kapasitas untuk menghadapi tantangan keamanan.<sup>24</sup>

Kerangka *security community* dapat memetakan pola interaksi yang terjadi di ASEAN dalam hubungannya dengan kerja sama keamanan dengan tidak melihat interaksi anggota-anggotanya notabene secara linier, melainkan melihat spesifikasi dan partikularitas kawasan ASEAN sendiri sebagai kawasan yang berbeda dari kawasan lain. Namun bagaimana hubungan resiprokal (timbang balik) yang dapat menunjukkan konstitutifnya komunitas keamanan dan komunitas ekonomi di suatu kawasan belum seutuhnya dapat dijabarkan dalam teori tersebut, karena masih berputar pada bidang pertahanan dan keamanan. Sedangkan munculnya ADMM dalam kerangka ASEAN

---

<sup>23</sup> Center for Strategic & International Studies, No. 25 (2011), “ASEAN Defence Industry Collaboration”, dalam <http://www.csis.org/isp/diig>, diunduh pada 6 November 2014.

<sup>24</sup> Tomotaka Shoji, “ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM) and ADMM Plus: A Japanese Perspective”, (*NIDS Journal of Defense and Security*, 14 Desember 2013), hlm. 10-12.

*Security Community* juga tidak lepas dari visi ASEAN 2020 dengan dicanangkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Dalam hal ini, Hardt dan Negri dalam *Multitude* melalui kerangka berpikir *state of exception* (kondisi istimewa) menjelaskan bahwa dalam satu teritori yang sudah disepakati untuk dilakukan kerja sama yang intensif, maka perilaku *members* dalam kawasan tersebut terhadap teritori lain cenderung menunjukkan asertifitas yang tidak lain berpolakan perang. Perang di sini tidak diartikan secara tradisional dan linier dimana perang selalu adalah pertempuran-pertempuran dari dua kekuatan besar (negara). Perang dapat berbentuk perang ekonomi ataupun perang maya (*cyberwar*)—sebagai contoh. Pada kasus ADMM dan ASEAN *Economic Community* ini, persepsi interaksi perang yang konfliktual niscaya akan terbentuk karena kawasan Asia Tenggara adalah kawasan tempat perebutan pengaruh baik Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Rusia dan Eropa Barat. Oleh karenanya, jika mekanisme pertahanan kolektif tidak dilakukan (dengan mensinergikan ekonomi dan keamanan), maka kualitas dan kuantitas kerja sama pasar bebas tidak akan terjamin lama.

Menggunakan teori Michel Foucault, seorang sosiolog politik Prancis yang memformulasikan teori *governmentality* untuk menjelaskan pola seni memerintah dalam pemerintahan neo-liberalisme, Hardt dan Negri menjelaskan bahwa pertahanan dan keamanan tidak bisa lepas dari kepentingan ekonomi karena di dalamnya juga terdapat kepentingan untuk menjaga tapal-tapal batas teritorial tempat berlangsungnya kerja sama ekonomi. Dalam hal ini, sejalan dengan Foucault, Hardt dan Negri melihat bahwa dengan demikian bukan lagi perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain, melainkan politik itu sendiri adalah kelanjutan dari perang dengan cara lain. Implikasinya dalam dan signifikan.

Giorgio Agamben melalui penelusuran filologinya menunjukkan bahwa ‘ekonomi’ sejak dari susunan makna dan bahasanya, telah ada unsur pertahanan dan politik di dalamnya. *Oikos* dan *nomos* membentuk kosakata *oikonomia* yang berarti pengaturan sumber daya yang langka dalam suatu rumah (teritori) dengan teritori lain. Pengaturan tersebutlah yang disebut dengan politik dengan cara lain, ataupun perang dengan cara lain.

ASEAN *Economic Community* memiliki semangat untuk mencapai visi ASEAN 2020, yakni adanya integrasi ekonomi yang berdasarkan konvergensi kepentingan dari anggota-anggota negara ASEAN untuk memperdalam kerjasama ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, ekonomi berdasarkan pasar dan aturan yang multilateral.<sup>25</sup> Kawasan Asia Tenggara dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *oikos*, yakni sebuah wilayah (rumah) yang berisikan *members* (negara-negara anggota). Adanya teritori menjadi prasarat bagi eksisnya kawasan ini, yakni dengan menciptakan *nomos*, atau upaya mengatur kebutuhan *oikos* tersebut sehingga kelangkaan dapat diminimalisir dan keamanan serta stabilitas dapat terjamin ketika kegiatan mengatur kelangkaan tersebut dilakukan.

Selain itu, dalam cetak biru ASEAN *Economic Community*, juga dicanangkan visi menyatukan ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang notabene negara-negara dengan pemerintahan yang cenderung otokratik.<sup>26</sup> Hal ini tentu membawa konsekuensi penguatan komitmen secara regional agar negara-negara tersebut mau ikut serta di bawah sistem pasar bebas, yang sangat dimungkinkan karena memiliki *political will* dalam meredam ketegangan, yang mana dibuktikan dengan adanya *arms dynamic* ketimbang *arms races*.<sup>27</sup>

### **ASEAN *Economic Community* sebagai *Oikos* yang Memungkinkan Signifikansi ADMM**

Terbentuknya ASEAN *Economic Community* tidak lain adalah kesadaran bahwa Asia Tenggara di satu sisi harus mengejar ketertinggalan dengan kawasan-kawasan negara maju lain baik dari sistem politik, ekonomi, dan investasi. Dari sistem politik, ASEAN sedang berjuang menjadi negara-negara yang sepenuhnya dewasa secara demokratis sehingga kemajuan di bidang ekonomi dimungkinkan terjadi dengan memungkinkan pula sikap saling menghormati antar negara. Dengan kata lain, melalui sistem yang demokratis

---

<sup>25</sup> “ASEAN Economic Community Blueprint”, 2008, dalam <http://www.asean.org>, diunduh pada 6 November 2014.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Richard Bitzinger menunjukkan bahwa Asia Tenggara, bahkan ketika negara-negara di dalamnya sedang meningkatkan anggaran belanja pertahanan, tidak memperlihatkan pola interaksi *security dilemma* yang tercermin dari fenomena *arms race*. Sebaliknya, Asia Tenggara lebih banyak menunjukkan pola interaksi *arms dynamic*. Lihat Richard Bitzinger, “A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 32, No. 1, 2010, hlm. 50–69.

dimungkinkan persaingan yang kompetitif tanpa adanya pergesekan di internal kawasan. Di sisi lain, ASEAN harus pula mandiri tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan-bantuan investasi negara-negara maju. Dengan membangun pasar bebas regional tersebut, maka negara-negara Asia Tenggara dapat sekuat Uni Eropa yang hampir tidak ada *border* dalam setiap kegiatan ekonominya.<sup>28</sup>

Hal inilah yang membuat perlu adanya regionalisme di Asia Tenggara. Bary Buzan memandang lebih jauh mengenai Asia Tenggara: selain bahwa kawasan ini dipandang sangat potensial oleh negara-negara maju,<sup>29</sup> namun kawasan ini juga mempunyai catatan sejarah kolonialisme yang sangat panjang.<sup>30</sup> Tercatat hanya Thailand yang tidak memiliki riwayat penjajahan, sedangkan sisanya menjadi negara jajahan baik Eropa maupun Amerika Serikat. Hal ini yang membuat Asia Tenggara memiliki pola interaksi yang disebut oleh Buzan sebagai Kompleksitas Keamanan Regional (*Regional Security Complex*). Dikatakan kompleks karena kawasan ini selain telah mengalami penjajahan yang panjang, juga menjadi memiliki budaya yang bercampur dengan negara-negara yang menjajahnya – yang memungkinkan mereka seperti kehilangan jati diri dan cenderung dikendalikan negara-negara maju lain.<sup>31</sup>

Di samping kompleksitas yang dialami oleh ASEAN akibat rekam jejak penjajahan, namun ASEAN tetap menjadi *aparatus* bagi Asia Tenggara yang terbentuk karena keinginan *members* dalam *oikos* untuk mengatur *house*-nya agar tidak tercampuri urusan-urusannya oleh *nomos* lain. Dengan adanya ASEAN –yang diikuti dengan upaya-upaya membangun komunitas ekonomi dan keamanan sendiri maka tercipta *aparatus* (aparatur) yang dapat setidaknya menjadi efek penggetar dan penangkal bagi *members-members*

---

<sup>28</sup> Membangun suatu kawasan yang notabene juga menciptakan variasi dalam multilateralisme memungkinkan interaksi yang lebih intensif dengan negara-negara lain. *International rule* atau aturan internasional yang bervariasi dengan demikian akan tercipta dan memungkinkan hegemoni dan hierarki dalam hubungan internasional dapat diminimalisasi. Lihat Charmaine Misalucha, “Southeast Asia-US Relations: Hegemony or Hierarchy?”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 2, 2011, hlm. 209–28.

<sup>29</sup> Jurgen Ruland melihat bahwa ASEAN meski selalu bersikap *hedging*, namun berkontribusi secara multilateral terhadap kawasan-kawasan lain di luarnya. Artinya, dengan bersikap berteman dengan siapa saja namun masih memegang posisi identitas yang kuat, ASEAN memberikan penguatan pula pada multilateralisme yang sekarang telah berubah dari multilateralisme negara-negara menjadi multilateralisme kawasan-kawasan. Lihat Jurgen Ruland, “Southeast Asian Regionalism and Global Governance: Multilateral Utility or Hedging Utility?”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 33, No. 1, 2011, hlm. 83–112.

<sup>30</sup> Bary Buzan dan Ole Weaver, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm.133-135.

<sup>31</sup> *Ibid*.



lain di kawasan lain agar mau mengikuti aturan main jika ingin tetap berhubungan baik dengan Asia Tenggara. Adanya ADMM di sini, berfungsi dan berkaitan erat dengan upaya penggetar dan penangkal tersebut, tanpa terkesan dengan citra *offensive*, karena memang pada dasarnya ADMM ditujukan untuk menangani permasalahan keamanan non-tradisional guna menghadapi tantangan dan ancaman tradisional.<sup>32</sup>

## Kesimpulan

ASEAN *Economic Community* (Masyarakat Ekonomi ASEAN) 2015 adalah prakondisi yang memungkinkan ASEAN *Defense Ministers' Meeting* (ADMM) menjadi penting dan signifikan bagi keberlangsungannya, dan lebih jauh lagi, bagi keberlangsungan ASEAN sendiri guna mencapai visi ASEAN 2020. Hal ini ditunjukkan dengan semangat pembentukan *security community* yang digagas oleh Karl Deutch dan diteruskan Amitav Acharya dalam analisisnya di kawasan Asia Tenggara; kemudian dielaborasi lagi dengan pendekatan *state of exception* Michael Hardt dan Antonio Negri serta Aparatus *oikonomia* Giorgio Agamben. Dengan pendekatan teoritis tersebut, argumen yang penulis tekankan pada tulisan ini adalah bahwa cita-cita/visi ASEAN 2020 yang dituangkan dalam implementasi ASEAN *Economic Community* sangat terkait dan menjadi landasan prakondisi yang memungkinkan ADMM menjadi signifikan keberadaannya. Oleh karena itu, hal tersebut harus benar-benar dimanfaatkan oleh ASEAN sebagai *bargaining position* diplomasi dengan komunitas multilateral di luar kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena pada dasarnya suatu kawasan yang memiliki *aparatus regionalisme*, yang merupakan cerminan dari anggota-anggota di dalamnya, cenderung akan membangun pertahanan yang kuat dengan tujuan menjaga stabilitas dan keamanan di wilayahnya guna mendukung pasar dan ekonomi bersama, yang tidak lain adalah upaya bersama untuk mencapai kebutuhan hidup dalam kawasan tersebut.

Dari analisis dan argumentasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa ADMM (dan ADMM plus) adalah forum yang sangat strategis guna mewujudkan dan menjamin keberlangsungan ASEAN *Economic Community* guna menjadi kekuatan bagi ASEAN sebagai organisasi regional serta negara-negara anggotanya sebagai kekuatan-kekuatan

---

<sup>32</sup> Lihat <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/category/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diunduh pada 6 November 2014.

ekonomi maupun kekuatan politik yang kuat. Tanpa mengesampingkan *ASEAN Way* sebagai budaya diplomasi negara-negara di ASEAN, ASEAN harus secara proaktif dan asertif membangun ADMM sebagai anti-tesis dari keengganan-keengganan kultural dari gaya diplomasi *ASEAN Way*. Oleh karenanya keberadaan ADMM plus harus menjadi kekuatan dan dimanfaatkan secermat-cermatnya bagi terjaminnya pelaksanaan *ASEAN Economic Community 2015*.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Acharya, Amitav. 2001. *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order*. New York: Routledge.
- Agamben, Giorgio. 2009. *What is an Apparatus? And Other Essays*. California: Stanford University.
- Buzan, Bary dan Ole Weaver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel. 1997. *Society Must be Defended: Lectures at the College De France*. New York: Picador.
- Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan: The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall*. London: St. Paulus Church-yard.
- Hardt, Michael & Antonio Negri. 2004. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. New York: The Penguin Press.
- Waltz, Kenneth. 1997. *Man, The State and War*. New York: Columbia University Press.

### Jurnal

- Bitzinger, Richard. 2010. "A New Arms Race? Explaining Recent Southeast Asian Military Acquisitions". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 32. No. 1.
- Misalucha, Charmaine. 2011. "Southeast Asia-US Relations: Hegemony or Hierarchy?". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 33, No. 2.
- Nye, Joseph. 1990. "Soft Power". *Foreign Policy Journal*. No. 80. Twentieth Anniversary.
- Rose, Nikolas & Peter Miller. 2010. "Political power beyond the State: problematics of government". *The British Journal of Sociology: London School of Economics and Political Science*.
- Ruland, Jurgen South. 2011. "East Asian Regionalism and Global Governance: Multilateral Utility or Hedging Utility?". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 33. No. 1.
- Shoji, Tomotaka. 2013. "ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) and ADMM Plus: A Japanese Perspective". *NIDS Journal of Defense and Security*, 14 Desember 2013.

### Website

- ASEAN Economic Community Blueprint, 2008, <http://www.asean.org>, diunduh pada 6 November 2014.
- Center for Strategic and International Studies. No. 25, 2011. "ASEAN Defence Industry Collaboration", dalam <http://www.csis.org/isp/diig>, diunduh pada 6 November 2014.
- <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/category/asean-defence-ministers-meeting-admm>, diunduh pada 6 November 2014.

